KATALOG:4601001.31

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2021

jakarta.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2021

https://jakarta.bps.go.id

PUBLIKASI STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN DKI JAKARTA, 2021

No. ISSN	: 2087-6645
No. Publikasi	: 31000.
Katalog BPS	: 4601001.31
Ukuran Buku	: B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman	: x + 27 halaman
Naskah	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Editor	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Gambar Kulit	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Layout	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Diterbitkan oleh	: ©BPS Provinsi DKI Jakarta
Dicetak oleh	: BPS Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi DKI Jakarta,

https://jakarta.bps.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Anggoro Dwitjahyono
Penanggungjawab Teknis	: Dwi Paramitha Dewi
Editor	: Dwi Paramitha Dewi
Penulis	: Hendra Setiawan
	Theresia Parwati
Pengolah Data	: Hendra Setiawan
Layout	: Theresia Parwati
Infografis	: Hendra Setiawan
Gambar Kulit	: Hendra Setiawan

https://jakarta.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan DKI Jakarta 2021 menyajikan gambaran tentang keadaan politik dan keamanan di DKI Jakarta. Secara rinci publikasi ini mengulas kondisi perpolitikan tentang komposisi kursi anggota DPRD, keterwakilan perempuan dalam kursi DPRD dan keterlibatan perempuan di dalam kepengurusan partai politik yang ada di Provinsi DKI Jakarta,

Dari sisi keamanan, publikasi ini memberikan gambaran keamanan di DKI Jakarta meliputi tindak kejahatan baik bentuk maupun jenis kejahatan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan penyelesaian perkara dari tindak. Data-data tersebut merupakan hasil pengumpulan data sekunder kegiatan Survei Statistik Politik dan Keamanan Tahun 2021, yang bersumber dari beberapa instansi seperti Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Partai Politik

https://jakarta.bps.go.id

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2021
BPS Provinsi DKI Jakarta
Kepala,

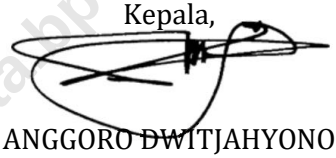

ANGGORO DWITJAHYONO

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR ISI

		halaman
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
I.	PENDAHULUAN	1
II.	POLITIK	4
	2.1 SISTEM PEMERINTAHAN	4
	2.2 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	6
	2.3 ANGGOTA LEGISLATIF	10
III.	KEAMANAN	13
	3.1 JUMLAH KEJAHATAN	14
	3.2 JUMLAH KEJAHATAN YANG DISELESAIKAN	15
	3.3 JENIS KEJAHATAN	16
IV.	PENUTUP	19

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1	Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2017Putaran Pertama……..	8
Tabel 2	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2017 Putaran Kedua……..	9
Tabel 3	Jumlah Kejahatan Berdasarkan Jenisnya, Tahun 2015-2017……..	16

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

		halaman
Gambar 1	Persentase Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2017……	12
Gambar 2	Jumlah Kejahatan yang tercatat, Tahun 2015-2017……..	14
Gambar 3	Jumlah Kejahatan Yang Diselesaikan, Tahun 2015 – 2017……..	15
Gambar 4	Lima Kejahatan Tertinggi di DKI Jakarta Tahun 2017……..	18

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

		halaman
Lampiran 1	Jumlah Anggota DPRD menurut asal Partai politik dan Jenis Kelamin Tahun 2017.....	20
Lampiran 2	Jumlah Kantor Polisi Tahun 2015-2017.....	21

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

I. PENDAHULUAN

I. 1 LATAR BELAKANG

Dengan berakhirnya sistem orde baru, era baru demokratisasi telah dimulai bagi politik Indonesia. Munculnya sistem politik yang semakin demokratis ditandai dengan pemulihan hak-hak politik rakyat, penguatan peran partai politik, terselenggaranya pemilihan umum parlemen yang demokratis, pengaktifan peran dan fungsi parlemen.

Pelaksanaan otonomi daerah pada awal reformasi sebenarnya membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di tingkat daerah. Eksistensi masyarakat, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan proses pengangkatan kepala daerah, khususnya pemilihan kepala daerah, mengalami kemajuan yang berbeda dengan era orde baru.

Namun pada kenyatannya, politik desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan otoritas politik kepada masyarakat lokal justru mengarah pada fenomena politik identitas. Potensi konflik dalam interaksi antar etnis yang bersaing menjadi sangat jelas. Salah satunya

https://jakarta.bps.go.id

seperti yang kita saksikan pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu.

Keberadaaan Jakarta sebagai ibukota negara dengan berbagai daya tarik ekonomi, politik, pendidikan, dan ketenagakerjaan, memicu urbanisasi yang mengakibatkan terjadinya heterogenitas penduduk di DKI Jakarta. Heterogenitas ini salah satunya berpotensi menciptakan risiko kerawanan sosial jika tidak ditangani dengan baik, Belum lagi masalah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Perlu antisipasi sejak awal untuk menciptakan suasana kondusif dan timbulnya rasa aman di masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera, sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan.

Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa ".....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

https://jakarta.bps.go.id

Indonesia.....". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya yang terkait dengan situasi politik dan keamanan, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menerbitkan publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2021. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan

http://jakarta.bps.go.id

masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan di Provinsi DKI Jakarta.

I. 2 TUJUAN

Publikasi ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran tentang keadaan politik dan keamanan di DKI Jakarta dan memberikan masukan bagi pemerintah Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk perencanaan pembangunann selanjutnya.

I.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan DKI Jakarta Tahun 2021 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan dan tabel-tabel. Pada setiap bab disertakan ulasan singkat untuk membantu pembaca menangkap gambaran yang disajikan dalam bab yang bersangkutan.

Data bersumber dari instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Partai Politik .

https://jakarta.bps.go.id

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini dikelompokan kedalam 4 bagian yaitu pendahuluan, politik, keamanan dan lampiran. Pendahuluan mengurai tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, jenis dan sumber data serta sistematika penulisan. Bagian I, {Bagian politik mengulas tentang komposisi partai politik, keterwakilan perempuan dalam komposisi kursi di DPRD dan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai politik.

https://jakarta.bps.go.id

II. POLITIK

2.1. Sistem Perwakilan

Pentingnya sistem perwakilan politik tidak lepas dari pembahasan sistem demokrasi karena representasi politik menyimpang dari perkembangan sistem demokrasi awal sesuai pemikiran Plato dalam bukunya "Rebuplika" sekitar 400 SM. Sebuah konsep untuk mewujudkan negara kota yang demokratis di mana setiap orang memiliki kedaulatan dalam kehidupan sosial dan politik mereka. Sebuah pemerintahan yang demokratis dapat dicapai di negara-kota Athena, seperti pada zaman Pericles. Rakyat memiliki kedaulatan melalui perwakilan yang duduk di dewan pemerintah kota.

Demokrasi dibangun dalam proses yang panjang. Pertama, kita mengenal demokrasi dengan menjalankan sistem demokrasi langsung di mana setiap orang yang tergolong dewasa berhak berpartisipasi dalam parlemen. Namun, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, sistem representasi demokrasi lama (demokrasi langsung) tidak tepat diterapkan di negara-negara berpenduduk. Kedua, solusinya adalah sistem demokrasi yang khas di mana

https://jakarta.bps.go.id

sejumlah besar warga negara yang berkepentingan yang tinggal di daerah atau distrik tertentu mendelegasikan kedaulatan kepada individu atau partai politik yang mereka percayai melalui pemilihan umum. Upaya kemaslahatan perseorangan, kelompok, dan masyarakat pada satuan-satuan kabupaten dan nasional merupakan satu kesatuan/sehingga inti konsep sistem demokrasi tipikal sejalan dengan sistem demokrasi langsung. yang terakhir memegang posisi pemerintah atau kemudian menghadiri parlemen.

Melihat kembali perkembangan konsep demokrasi, itu bisa sangat luas, tergantung bagaimana Anda berpikir dan memaknai konsep demokrasi. Dalam pandangan Budi Praitono, demokrasi bukan hanya seperangkat ide dan prinsip kebebasan, tetapi juga seperangkat praktik dan prosedur yang telah terbentuk sepanjang sejarah.

Pengertian demokrasi berasal dari bahasa latin (demo) dan kratos (pemerintahan), sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah situasi yang terjadi di Yunani kuno ketika konsep demokrasi pertama kali lahir. Saat itu masyarakat belum terikat oleh nilai-nilai spiritual, sehingga kedaulatan

https://jakarta.bps.go.id

demokrasi sepenuhnya tergantung pada kehendak mereka yang memiliki sistem negosiasi antar warga. Secara terminologi, suara rakyat adalah suara Tuhan dan memegang aturan hukum tertinggi bagi rakyat. Dalam hal ini, demokrasi mencoba menyimpulkan bahwa, dari sudut pandang politik, itu adalah sistem politik di mana para anggota menganggap diri mereka setara satu sama lain. Meskipun sistem politik membantu merumuskan kepentingan rakyat atau mengidentifikasi kepentingan penduduk. Kedua, sebagai pemilihan eksekutif atau pengambil keputusan, atau sebagai pilihan eksekutif atau pejabat pengambil keputusan.

Salah satu perwujudan demokrasi yang bisa kita lihat adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 1950, tetapi pemilihan langsungnya baru dilaksanakan sejak Pemilu 2004. Pemilu dan Pilpres 2004 merupakan tonggak awal sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi 1998.

Pada tahun 2019 yang lalu, Indonesia secara umum dan Jakarta secara khusus kembali melaksanakan Pemilu. Pada Pemilu kali ini, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara serentak

https://jakarta.bps.go.id

pada tanggal 17 April 2019. Berikut adalah peta Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Provinsi DKI Jakarta.

Grafik 2.1. Peta Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Provinsi DKI Jakarta

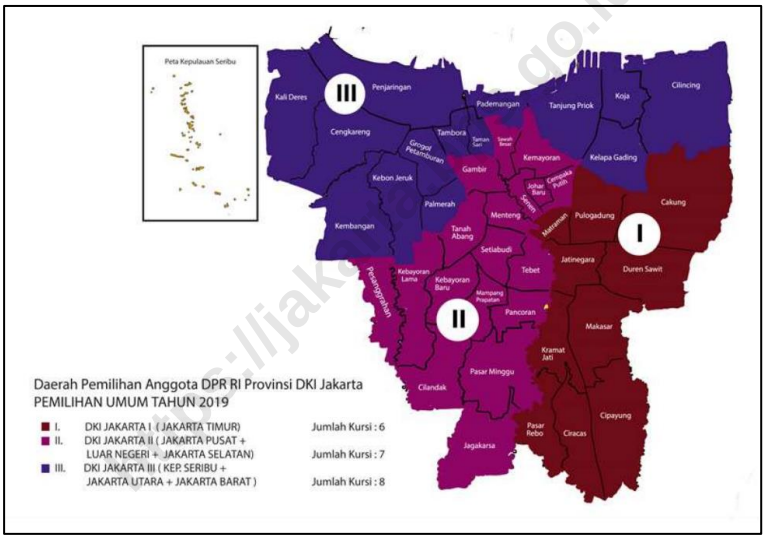

Sumber: KPUD DKI Jakarta, 2019

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang lalu, terdapat penambahan empat kontestan baru menjadi 16 partai (baca: parpol peserta Pileg 2014 berjumlah 12 parpol). Partai-partai pendatang baru tersebut Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai

Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) serta Partai Berkarya. Dari keempat kontestan baru tersebut, hanya PSI yang berhasil mendapatkan kursi, bahkan jumlahnya jauh melebihi kontestan lama.

Grafik 2.2. Jumlah Kursi Anggota DPRD DKI Jakarta Periode Tahun 2019-2024

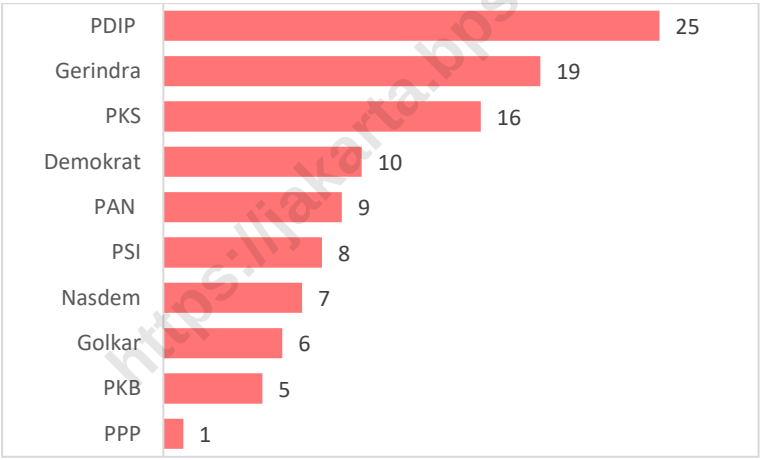

https://jakarta.bps.go.id

Sumber: Setwan DPRD DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, dari jumlah keseluruhan 106 kursi yang diperebutkan diisi oleh sepuluh (10) partai politik. Perolehan kursi secara rinci adalah sebagai berikut PDIP (25

kursi, Partai Gerindra (19 kursi), PPP (1 kursi), PKS (16) kursi, Partai Golkar (6 kursi), Partai Demokrat (10 kursi), PKB (5 kursi), Partai Nasdem (7 kursi), PAN (9 kursi) dan Partai PSI (8 kursi).

Partai dengan perolehan suara terbanyak adalah PDIP diikuti oleh Gerindra dan PKS. PSI sebagai pendatang baru meraih sukses yang sangat besar karena berhasil mendapatkan delapan kursi, bahkan jauh melebihi beberapa partai yang sudah lebih lama. Partai yang kehilangan kursi pada periode 2019-2024 ini adalah Parta Hanura. Hasil Pemilu di Jakarta ini, sedikit banyak menggambarkan kondisi masyarakat Jakarta yang sangat dinamis dan selalu terbuka pada perubahan.

https://jakarta.bps.go.id

2.2. Partisipasi Politik dan Perempuan

Hasil Sensus Penduduk 2020 menyatakan 49,42 persen dari total 270,20 juta penduduk Indonesia adalah penduduk perempuan. Artinya komposisi antara penduduk laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Namun tidak demikian halnya dengan partisipasi perempuan di ruang publik. Perempuan masih termarjinalisasi secara politis, sosial, kultural dan ekonomis-yanghampir selalu absen pada

proses-proses pengambilan keputusan. Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia harus ditempatkan di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis yang menjamin adanya kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas (Parwati, 2020).

Grafik 2.3. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dari Pemilu 1950-2019

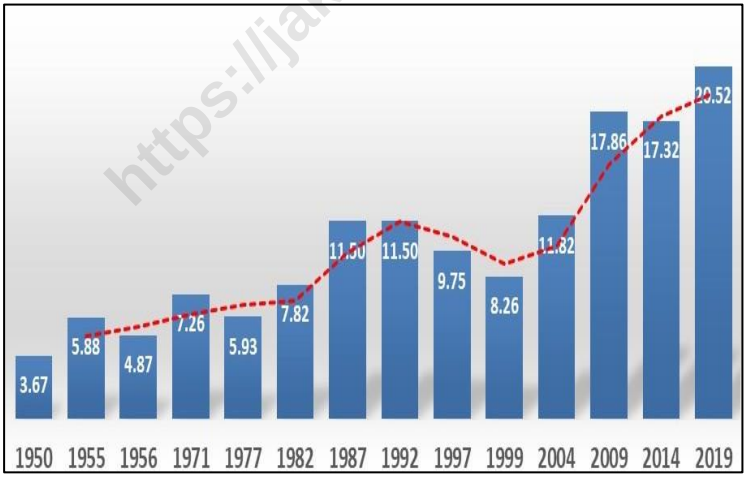

Sumber: Parwati, 2020

https://jakarta.bps.go.id

Dari Pemilu ke Pemilu peta kekuasaan terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami perubahan. Pada Pemilu 2019 yang lalu, dari 575 orang anggota DPR yang ter- pilih untuk masa bakti 2019-2024, sebanyak 118 orang (20,52 persen) diantaranya adalah perempuan. Kuota 30 persen keterwakilan perempuan- UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009 - di parlemen masih belum dapat direalisasikan hingga saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut, keterwakilan perempuan di legislatif Jakarta juga masih belum sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Berikut ini adalah komposisi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 menurut jenis kelamin menurut asal partai.

https://jakarta.bps.go.id

Grafik 2.4. Persentase Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024

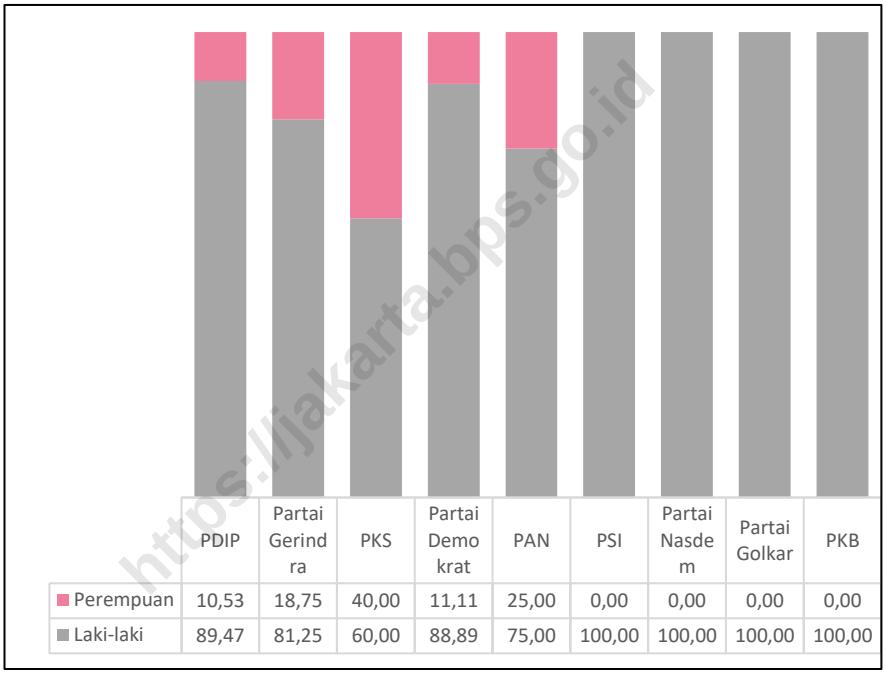

	PDIP	Partai Gerindra	PKS	Partai Demokrat	PAN	PSI	Partai Nasdem	Partai Golkar	PKB
Perempuan	10,53	18,75	40,00	11,11	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laki-laki	89,47	81,25	60,00	88,89	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Keterlibatan perempuan didalam perpolitikan di DKI Jakarta dapat terlihat pula didalam kepengurusan partai-partai politik di DKI Jakarta, berikut persentase komposisi perempuan dapat dilihat pada Gambar 2.

Grafik 2.5. Persentase Komposisi Keterwakilan Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin ,2020

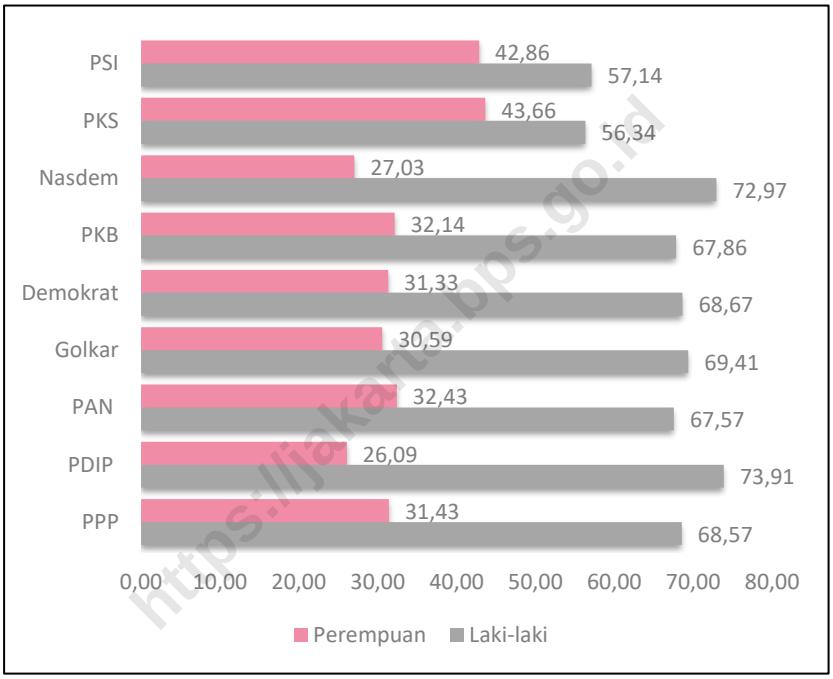

https://jakarta.bps.go.id

III. KEAMANAN

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, tercipta pula kemunduran-kemunduran yang membentuk suatu kondisi terjadinya kemerosotan lingkungan sosial yang ditandai dengan sering terjadinya tindak kejahatan yang kadang melampaui batas kemanusiaan yang beradab.

Kriminalitas lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia di muka bumi ini. Dalam sejarah peradaban manusia, kriminalitas sebagai kejadian pelanggaran hukum yang bersifat pidana merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat paling dominan. Tingkat kuantitas dan kualitas kriminal juga searah dengan kemajuan peradaban manusia, semakin maju peradaban manusia, semakin meningkat pula jenis dan modus operandi tindak kejahatan. Dan dengan semakin

https://jakarta.bps.go.id

meningkatnya teknologi, kejahatan juga semakin marak dilakukan dengan menggunakan alat- alat berteknologi tinggi dan menggunakan jaringan telekomunikasi dan dilakukan cukup dengan duduk di belakang layar komputer.

3.1. JUMLAH KEJAHATAN

Jumlah Kejahatan (*Crime total*) adalah seluruh kejahatan yang tercatat di Polda Metro Jaya pada satu tahun atau biasa disebut dalam data polisi jumlah lapor. Jumlah Kejahatan di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan di tahun 2019 dan tahun 2018. Hal ini tentunya merupakan keberhasilan kinerja kepolisian khususnya Polda Metro Jaya semakin baik. Keberhasilan didalam menurunkan angka kejahatan tidak lepas dari pencanangan Kapolri pada tahun 2020 dengan 3 (tiga) Konsep Transformasi menuju Polisi Republik Indonesia yang Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan. Yang secara keselurahan konsep ini ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan. Selain itu tugas kepolisian tidak lepas dari peran serta dan kesadaran yang tinggi dari semua masyarakat didalam membantu tugas

https://jakarta.bps.go.id

kepolisian. Jumlah Kejahatan selama periode tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.

Grafik 3.1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, 2018-2020

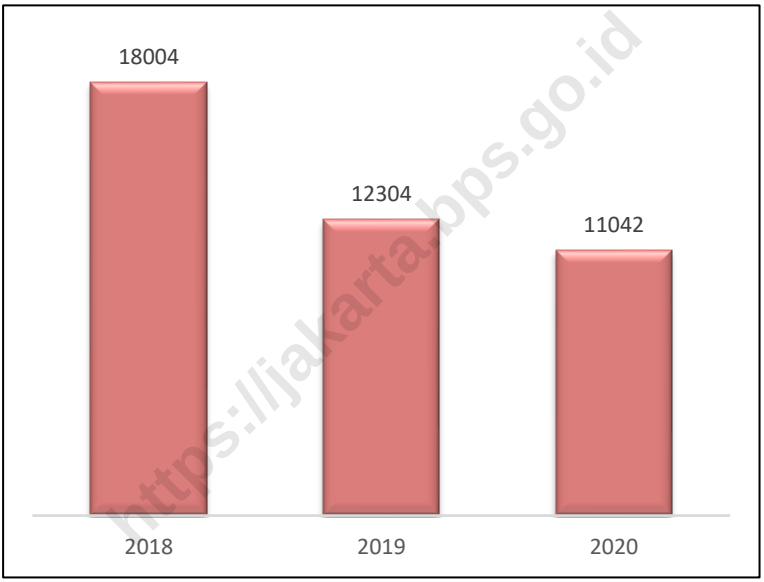

https://jakarta.bps.go.id

4.1. JUMLAH KEJAHATAN YANG DISELESAIKAN

Jumlah Kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah seluruh kejahatan yang diselesaikan pada satu tahun oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Jumlah kejahatan yang diselesaikan oleh polisi (*Crime cleared*) selama periode tahun 2018-2020 menunjukkan perubahan yang semakin baik. Hal

ini memberikan indikasi semakin profesionalnya kepolisian Indonesia untuk menyelesaikan perkara.

Grafik 3.2. Jumlah Kejahatan Yang Diselesaikan, 2018-2020

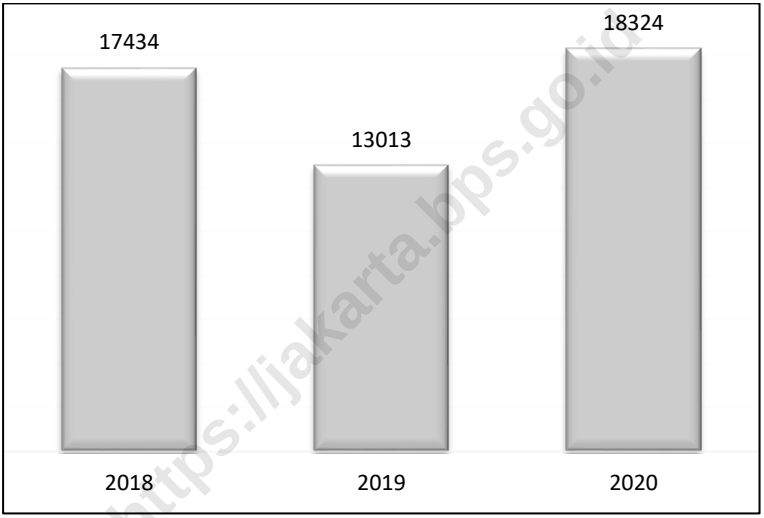

https://jakarta.bps.go.id

Jumlah kejahatan yang diselesaikan selama tahun 2020 adalah sebanyak 18.324 kasus, atau sebesar 65,95 persen dari total kejahatan yang tercatat. Tahun 2019 sebesar 5,76 persen dan tahun 2018 mengalami penurunan penyelesaian jumlah kejahatan sebesar (3,16) persen terhadap kejahatan yang tercatat.

Dari Jumlah Kejahatan yang diselesaikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya pada tahun 2020 menunjukan kemampuan dan kinerja semakin baik dan profesional.

4.2. TINGKAT RESIKO TERKENA KEJAHATAN

Sejalan dengan jumlah kejahatan (*Crime total*) pada periode tahun 2018 -2020, tingkat resiko terkena kejahatan (*Crime rate*) setiap 100.000 penduduk DKI Jakarta mengalami penurunan, yaitu 171 pada tahun 2018 menjadi 116 pada tahun 2019, dan menjadi 104 pada tahun 2020. *Crime Rate* merupakan angka yang dapat menunjukan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu pada waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

https://jakarta.bps.go.id

4.3. JENIS KEJAHATAN

Selama Tahun 2019-2020 dikelompokan kedalam 9 (sembilan) Jenis kejahatan yang dicatat di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hal ini dapat terlihat pengelompokan jenis kejahatan secara rinci seperti dibawah ini dibawah ini:

1. Kejahatan terhadap nyawa: Pembunuhan

2. Kejahatan terhadap Fisik/Badan: Penganiayaan Berat, Penganiyaan Ringan dan Kekerasan dalam Rumahtangga.
3. Kejahatan terhadap Kesusilaan: Perkosaan dan Pencabulan.
4. Kejahatan terhadap Kemerdekaan orang: Penculikan dan Mempekerjakan Anak dibawah umur.
5. Kejahatan terhadap Hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan: Pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api (senpi) dan Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam (sajam).
6. Kejahatan terhadap hak milik/barang: Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, Pembakaran dengan sengaja dan Penadahan.
7. Kejahatan terkait Narkotika: Narkotika dan Psikotropika.
8. Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi : Penipuan/perbuatan curang, Penggelapan dan Korupsi.
9. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

https://jakarta.bps.go.id

Tabel 3.1. Jumlah Kejahatan Berdasarkan Jenisnya, 2019-2020

No.	Jenis Kejahatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kejahatan terhadap nyawa	54	36
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	1.777	1.976
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	144	145
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan orang	24	35
5	Kejahatan terhadap Hak milik/Barang dengan penggunaan kekerasan	571	473
6	Kejahatan terhadap Hak milik/Barang	4.841	6.220
7	Kejahatan terkait Narkotika	5.893	4.827
8	Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi	421	338
9	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	266	337
Total		**13.991**	**14.387**

https://jakarta.bps.go.id

Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa kelompok jenis kejahatan terhadap hak milik/barang semakin meningkat terjadi di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai tahun 2020, yaitu sebesar 1.379 kasus atau 28,48 persen. Kelompok jenis kejahatan terkait narkotika selama periode tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan kasus kejahatan sebesar 1.066 kasus atau 18,09 persen. Bahkan hal ini terjadi

penurunan pada kelompok enis kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi sebesar 83 kasus atau 19,71 persen. Di periode selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang mengalami kenaikan terjadi pada kelompok jenis kejahatan terhadap fisik/badan sebesar 199 kasus atau sebesar 11,19 persen. Hal ini terjadi pula pada kelompok jenis kejahatan terhadap ketertiban umum sebesar 71 kasus atau sebesar 26,70 persen.

Secara keseluruhan di DKI Jakarta 3 (tiga) kelompok besar jenis kejahatan selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang cukup tinggi terjadi pada pada Kejahatan terhadap Hak milik/Barang, Kejahatan terkait Narkotika dan Kejahatan terhadap Fisik/Badan.

https://jakarta.bps.go.id

Grafik 3.3. Tiga Jenis Kelompok Kejahatan Tertinggi di DKI Jakarta, 2019-2020

https://jakarta.bps.go.id

IV. PENUTUP

Pada akhirnya, suasana politik yang kondusif akan menciptakan keamanan. Kondusifitas ini dibutuhkan untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan lancer dan memberikan hasil sesuai harapan.

Terciptanya kondusifitas ini bukan hanya tanggung jawab apparat semata, tetapi adalah tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk warga negaranya. Kesadaran akan hal ini sangat penting untuk dapat dimiliki oleh seluruh warga secara khusus warga DKI Jakarta sebagai garda terdepan penjaga ibu kota negara tercinta.

https://jakarta.bps.go.id

LAMPIRAN 1. ANGGOTA DPRD MENURUT ASAL PARTAI DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2017

NO	ASAL PARTAI	LK	PR	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDI PERJUANGAN	18	10	28
2	GERINDRA	10	5	15
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9	2	11
4	DEMOKRAT	8	2	10
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	1	10
6	HANURA	10	0	10
7	PARTAI GOLKAR	9	0	9
8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	0	6
9	PARTAI NASDEM	5	0	5
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	0	2

https://jakarta.bps.go.id

LAMPIRAN 2. JUMLAH KANTOR POLISI, TAHUN 2015-2017

NO	KANTOR POLISI	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JUMLAH POLRES/POLRESTA	7	7	7
2	JUMLAH POLSEK/POLSEKTA	47	47	47
3	JUMLAH POS POLISI	204	204	204

https://jakarta.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://jakarta.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIIK
PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban, Senen
Jakarta pusat 10440
Telp. +62 21 31928493, Fax +62 21 3152004
Homepage : http://jakarta.bps.go.id
E-mail : bps3100@bps.go.id

9 772087 664000